



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024.

Bali, 04 Agustus 2023
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali



Di. I Wayan Ekadina, SE., M.Si.
NIP. 19701211 199803 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024	7
1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan.....	7
1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026	8
1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS.....	8
1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota.....	8
1.4 Maksud Penyusunan Rrencana Kerja Perangkat Daerah.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu.....	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024	44
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	46
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	46
3.3. Program dan Kegiatan	47
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
Bab V Penutup.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Provinsi Bali
Tabel 2.1	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Tabel 2.5	Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Tabel 2.6	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022
Tabel 2.7	Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 Sebelum dan Sesudah Pergeseran Anggaran
Tabel 2.8	Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024
Tabel 2.9	Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tahun 2022 Sebelum dan Sesudah Refocusing Anggaran
Tabel 2.10	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 2.11	Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Tabel 2.12	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kkinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
Tabel 2.13	Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan Target Jangka Meanengah yang Terdapat dalam dokumen RENSTRA
Tabel 2.14	Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2022
Tabel 2.15	Analisis atas Efisiensi penggunaan Sumber Daya
Tabel 2.16	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Tabel 2.17	Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022
Tabel 2.18	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Bali
Tabel 3.1.	Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024
Tabel 4.1	Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Penentuan Pagu Anggaran

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 1.2 Kedudukan RKPD dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat antara lain program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta perkiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

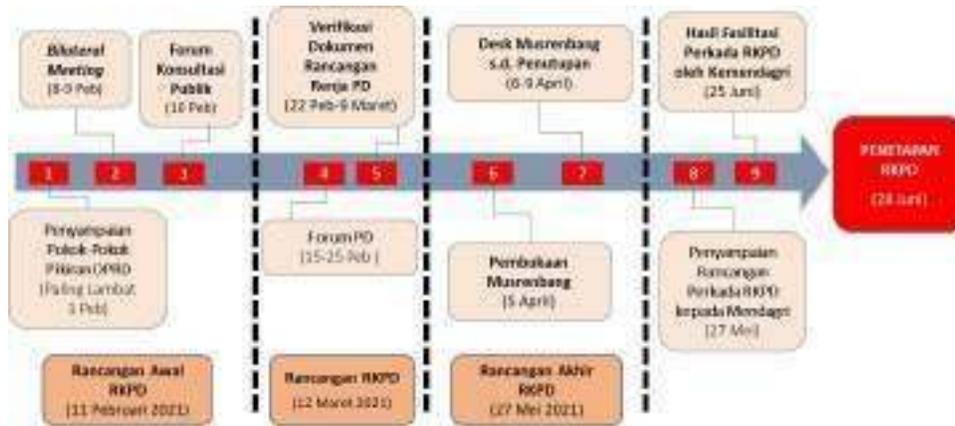
Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja ini juga berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebelum ditetapkan Renja harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memiliki rincian tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi serta penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Proses penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 telah dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) Bilateral Meeting; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2024 disajikan dalam Gambar 1.1.

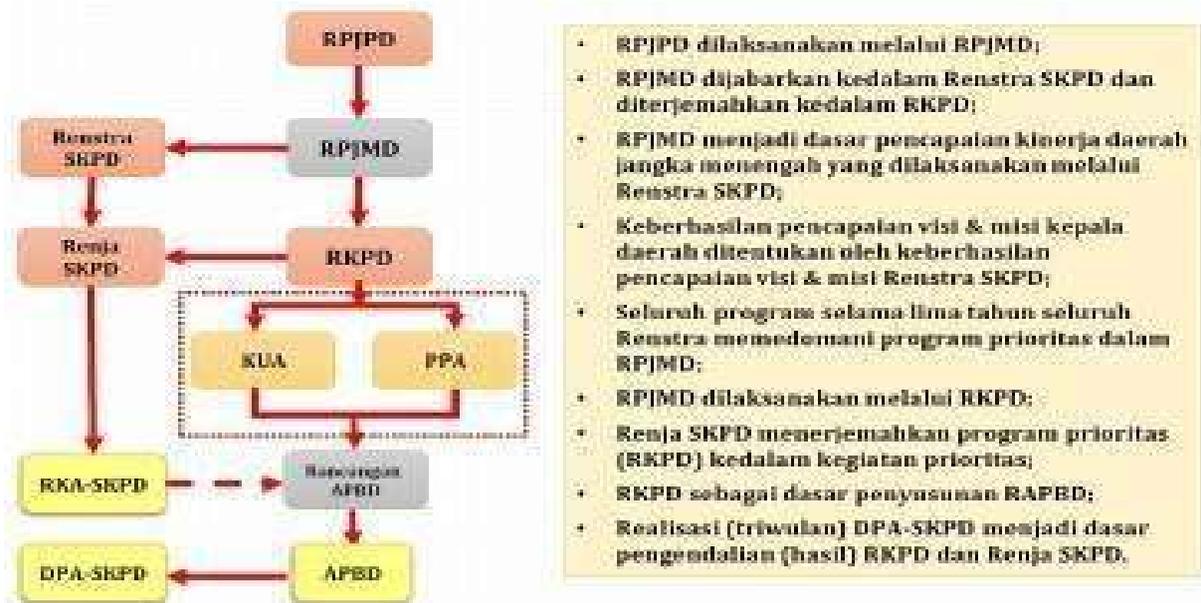


Gambar 1. 1 Proses Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024

Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian visi & misi Renstra SKPD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD.

Gambar 1. 2 Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :

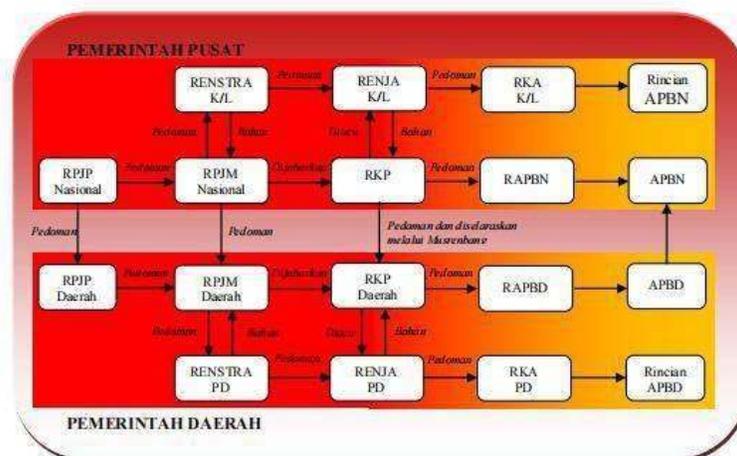
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang -undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provin
21. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun bersamaan dengan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2024. Hubungan dokumen RKPD Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1. 3 Bagan Hubungan Antara Dokumen terhadap RKPD Tahun 2024

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah. Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2024

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 terutamamenyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2024 merupakan RKP tahun keempat yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2020-2024. Keterkaitan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 dan RKP Tahun 2024 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Semesta Berencana Tahun 2005-2025 sebagai rencana pembangunan jangka panjang telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan

berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026

Dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tahun berkenaan (Tahun 2024).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah dokumen yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

- 2) Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam pembangunan daerah;
- 3) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja;
- 4) Menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi sekretariat,seluruh bidang dan UPTD lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.
- 5) Menjamin keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, baik berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja.

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Rencana Kerja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rrenstra SKPD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Memuat telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jarring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini pembahasan dibagi menjadi :

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2023 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali .

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :
 - Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi

- Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun per Januari 2023, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	1
2	Strata 2	16
3	Strata 1	39
4	Diploma III	2
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	10
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	1
Total		69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2023)

Berdasarkan tabel 2.1 menggambarkan tingkat pendidikan Pegawai ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didominasi oleh Strata 1(satu) 56,52 %, strata 2 (dua) 23, 19%, Strata 3(tiga) 1,45 %, SMA 14,50%, Diploma 2,90% serta SD 1,45%.

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	17
2	Golongan III	45
3	Golongan II	7
4	Golongan I	1
Total		70

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Juli 2023)

Dari tabel 2.2 menggambarkan bahwa Golongan III mendominasi ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sejumlah 64,28%, Golongan IV 24,29%, Golongan II 10%, Golongan I 1,43%.

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan (Struktural dan Fungsional)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
JABATAN STRUKTURAL		
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	5
JABATAN FUNGSIONAL		
1	Perencana Ahli Muda	1
2	Pustakawan Penyelia	1
3	Pengawas Koperasi	11
4	Pengembang Kewirausahaan	3
4	Pranata Komputer	1
Total		28

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (Juli 2023)

Dari tabel 2.3 menggambarkan, bahwa Jabatan Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sudah terisi, dan hanya satu Jabatan Kepala UPTD Diklat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang belum terisi yang mengalami purna tugas pada bulan Juni, sementara Jabatan Fungsional sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Non ASN Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Tenaga Administrasi	41
2.	Sopir	8
3.	Tenaga Teknis/Lapangan	-
4.	Penjaga Malam	9
5.	Cleaning Service dan Tukang Kebun	11
Total		69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Bali (2023)

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah pegawai Non PNS sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang, sangat membantu dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, mengingat didominasi dari generasi milenial dalam pemahaman terhadap sistem kerja digital.

Tabel 2.5
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN	KETERANGAN
1	Tanah	6.345 m2	
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	4 unit	2 unit rusak ringan
3	Kendaraan Operasional Roda 4	10 unit	2 unit rusak ringan
4	Kendaraan Operasional Roda 2	14 unit	3 unit rusak ringan
5	Meja Kerja	231 buah	
6	Kursi Kerja	229 buah	
7	Komputer	31 unit	
8	Printer	24 unit	
9	Filling Cabinet	29 unit	
10	Rak kaca/kayu	23 unit	
11	Lemari besi/Kayu	24 unit	
12	AC	69 unit	7 unit rusak berat
13	Zise	9 Unit	2 unit rusak berat
14	Kursi Tamu	12 unit	
15	Alat Kantor lainnya	3 unit	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (2023)

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali akan mengganggu capaian kinerja yang telah ditargetkan, terutama fasilitas komputer, ruang rapat dan fasilitas pendukung ruang rapat dalam pelaksanaan rapat baik yang diselenggarakan melalui online maupun offline, untuk itu perlu didukung pengadaan terhadap dukungan sarana dan prasarana tersebut.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Bali dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024- 2026. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun kelima akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.
1	2	3		4		5 = (4/3) x 100%		13
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			23.344.418.533		22.321.546.376		95,62 %	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,5	Persen	15.058.868.555	(nilai belum keluar)	14.463.273.014	0,00%	96,04 %
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	3	<i>Dokumen</i>	80.630.016	3 <i>Dokumen</i>	80.033.676	100,00 %	99,26 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	2	Dokumen	78.417.006	2 Dokumen	78.049.876	100,00 %	99,53 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	1	Dokumen	2.213.010	1 Dokumen	1.983.800	100,00 %	89,64 %
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	1	<i>Layanan</i>	12.586.926.541	1 <i>layanan</i>	12.215.344.802	100,00 %	97,05 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	12.586.926.541	14 Dokumen	12.215.344.802	100,00 %	97,05 %
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik</i>	6	<i>Layanan</i>	96.895.770	4 <i>layanan</i>	85.069.060	66,67%	87,79 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	9.999.250	1 layanan	9.585.873	100,00 %	95,87 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	64.931.520	1 layanan	56.770.136	100,00 %	87,43 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.
1	2	3		4		5 = (4/3) x 100%		13
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	14.965.000	1 layanan	12.311.051	100,00 %	82,27 %	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	7.000.000	1 layanan	6.402.000	100,00 %	91,46 %	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan	1.335.111.200	3 layanan	1.229.595.356	100,00 %	92,10 %	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	2.000.000	1 layanan	2.000.000	100,00 %	100,00 %	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	271.200.000	1 layanan	178.654.156	100,00 %	65,88 %	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	1.061.911.200	1 layanan	1.048.941.200	100,00 %	98,78 %	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	959.305.028	6 jenis	853.230.120	200,00 %	88,94 %	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	729.460.536	2 jenis	633.589.352	100,00 %	86,86 %	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 Jenis	50.000.000	2 jenis	46.465.000	100,00 %	92,93 %	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit	179.844.492	2 unit	173.175.768	100,00 %	96,29 %	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang bankable	83,33 Persen	255.064.240	24,01	239.330.844	28,82%	93,83 %	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	71 Koperasi	17.956.000	71 koperasi	16.111.052	100,00 %	89,73 %	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.
1	2	3		4		5 = (4/3) x 100%		13
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp	
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	71 Koperasi	17.956.000	71 koperasi	16.111.052	100,00 %	89,73 %	
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang yang diterbitkan	5 Koperasi	237.108.240	5 koperasi	223.219.792	100,00 %	94,14 %	
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	5 Koperasi	237.108.240	5 koperasi	223.219.792	100,00 %	94,14 %	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	78,89 Persen	118.552.896	32,89 PER	118.314.446	41,70%	99,80 %	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	142 KSP/USP Koperasi	118.552.896	100 KSP/USP Koperasi	118.314.446	70,42%	99,80 %	
Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang sehat	100 KSP/USP Koperasi	118.552.896	100 KSP/USP Koperasi	118.314.446	100,00 %	99,80 %	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	3,08 Persen	468.864.290	3,42	442.710.474	111,06 %	94,42 %	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.
1	2	3		4		5 = (4/3) x 100%		13
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp	
<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi</i>	126	Koperasi 468.864.290	124	442.710.474	98,41%	94,42%	
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	60	Koperasi 315.246.554	60	Koperasi 292.723.244	100,00%	92,86%	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	64	Koperasi 153.617.736	64	Koperasi 149.987.230	100,00%	97,64%	
	Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	Koperasi	1	Koperasi	100,00%		
	Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	Koperasi	1	Koperasi	100,00%		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	0,12	Persen 1.137.543.380	0,04	1.113.338.958	35,94%	97,87%	
<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid</i>	190	UMKM 1.137.543.380	190	UMKM 1.113.338.958	100,00%	97,87%	
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	190	UMKM 1.137.543.380	368	UMKM 1.113.338.958	100,00%	97,87%	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								UPT D
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			6.305.525.172		5.944.578.640		94,28%	UPT D

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.	
		3		4		5 = (4/3) x 100%			
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp		
1	2	83,5	Persen	482.271.956	12	444.122.270	14,37%	92,09%	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja								UPT D
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	1	Layanan	64.396.000	-	62.543.376	0,00%	97,12%	<i>UPT D</i>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14	Dokumen	64.396.000		62.543.376	0,00%	97,12%	UPT D
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	5	Layanan	4.416.220	3	3.609.815	60,00%	81,74%	<i>UPT D</i>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	689.500	1	376.500	100,00%	54,60%	UPT D
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	2.726.720	1	2.521.965	100,00%	92,49%	UPT D
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	1.000.000	1	711.350	100,00%	71,14%	UPT D
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0,00%		UPT D
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	-		-	0,00%		UPT D
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	3	Layanan	239.452.392	3	209.168.740	100,00%	87,35%	<i>UPT D</i>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	Layanan	1.000.000	1	1.000.000	100,00%	100,00%	UPT D

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Ket.
		3		4		5 = (4/3) x 100%		
		Volume	Rp	Volume	Rp	K	Rp	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	48.500.000	1 Layanan	18.665.823	100,00 %	38,49 %	UPT D
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan	189.952.392	1 Layanan	189.502.917	100,00 %	99,76 %	UPT D
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3 Jenis	174.007.344	6 Jenis	168.800.339	200,00 %	97,01 %	UPT D
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 Jenis	95.784.448	2 Jenis	90.723.443	100,00 %	94,72 %	UPT D
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	2 Jenis	3.270.000	3 Jenis	3.124.000	150,00 %	95,54 %	UPT D
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	74.952.896	1 unit	74.952.896	100,00 %	100,00 %	UPT D
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,25 Persen	5.823.253.216	7,56	5.500.456.370	3025,44 %	94,46 %	UPT D
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan	50 Orang	5.823.253.216	1.519 orang	5.500.456.370	3038,00 %	94,46 %	UPT D
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	50 Orang	5.823.253.216	1.519 orang	5.500.456.370	3038,00 %	94,46 %	UPT D

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2022 melaksanakan 6 (enam) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp 23.344.418.533,00 (Dua puluh tigamilyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah). Realisasi dana dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Rp22.321.546.376,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satujuta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar 95,62% sedangkan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKJIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2022, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp23.344.418.533,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian : Belanja Pegawai sebesar Rp12.651.322.541,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.505.595.992,00 (Sepuluh milyar lima ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua rupiah), Belanja Subsidi sebesar Rp37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Belanja Hibah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

Tabel 2.7
Target belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022
Sebelum dan Sesudah Pergeseran Anggaran

NO	URAIAN	AWAL	PERGESERAN
		TOTAL (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Alokasi anggaran Tahun 2022	22.441.608.190,00	23.344.418.533,00
2	Belanja Pegawai	14.255.730.998,00	12.651.322.541,00
3	Belanja Barang dan Jasa	7.998.377.192,00	10.505.592.992,00
4	Belanja Subsidi	37.500.000,00	37.500.000,00
5	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00

Tabel 2.9
Target Belanja Program/Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2022 Sebelum dan Sesudah Pergeseran Anggaran

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Pergeseran (Rp)
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	255.064.240,00	255.064.240,00
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	118.552.896,00	118.552.896,00
4	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	468.864.290,00	468.864.290,00
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	609.048.900,00	1.137.543.380,00
7	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasiaan	3.844.528.896,00	5.823.253.216,00
8	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.145.548.968,00	15.541.140.511,00
	TOTAL	22.441.608.190,00	23.344.418.533,00

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.10
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
a.	Sangat Baik	≥ 91%
b.	Baik	76 – 90,99%
c.	Cukup	66 – 75,99%
d.	Kurang	51 – 65,99%
e.	Sangat Kurang	≤

b. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.11
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Tahun Berjalan			Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi	Capaian %		
1		4	5	6	7	8
1 Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25%	25,64%	101%	Sangat Baik	Dinas Koperasi, UKM Prov. Bali
a Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85%	6,44%	94%	Sangat Baik	Bidang Kelembagaan Koperasi
b Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,56%	9,99%	104%	Sangat Baik	Bidang Pemberdayaan UKM dan BPS

Pada tabel di atas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2022 sudah sangat baik.

Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan indikator “Persentase KUMKM Menuju Digital”, target tahun 2022 adalah 22,25% dan Realisasinya 25,64% dengan kategori **Sangat Baik**. Dapat dijelaskan tujuan digitalisasi KUMKM adalah upaya untuk mengubah cara kerja manajemen koperasi pada umumnya menjadi manajemen koperasi secara digital, hal ini akan mempermudah koperasi dalam menjalankan bisnisnya, dan juga dalam memberikan pelayanan bagi seluruh anggotanya melalui Aplikasi Koperasi Digital dan bagi UMKM adanya digitalisasi koperasi akan mempermudah para UMKM untuk mencari tambahan modal dalam pengembangan usahanya, digitalisasi koperasi memberikan kemudahan serta kenyamanan dalam pengajuan pinjaman modal tanpa harus berurusan dengan bank yang biasanya memiliki bunga yang tinggi.

Selain itu, adanya digitalisasi koperasi akan membuat transparansi penyalurandana serta catatan mengenai keanggotaan lebih mudah dan jauh lebih aman untuk diakses, pelayanan yang diberikan koperasi kepada para anggotanya pun jauh lebih mudah dengan adanya digitalisasi koperasi. Serta adanya digitalisasi koperasi akan memudahkan dalam menghubungkan antara pelaku UMKM dengan pembelinya melalui aplikasi berbasis digitalisasi, yang mana dengan adanya hal tersebut para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas ekonominya dan produksinya. Peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam digitalisasi Koperasi dan UMKM adalah

membentuk ekosistem Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan sehat dalam menjankan kegiatan dan usahanya dengan Cara baru dan Manajemen Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Corporate Governance) Serta Memiliki Daya Saing dan Adaptif terhadap Perkembangan Zaman.

Realisasi indikator sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2022 “Persentase peningkatan produktivitas koperasi” adalah 6,44% dari target sebesar 6,85% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 94%. Peningkatan produktivitas koperasi adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. capaian ini bisa diwujudkan dengan melakukan aktivitas melaksanakan temu konsultasi dengan lembaga keuangan Bank dan Non Bank, sosialisasi dan pemanfaatan KUR dan skim-skim kredit lainnya. Namun dampak pandemi Covid-19 masih terasa sampai dengan saat ini, dimana berkurangnya SHU dan Modal koperasi yang disebabkan penurunan tingkat perekonomian peserta sehingga transaksi-transaksi menjadi macetserta banyak peminjam belu dapat mengembalikan pjamannya sehingga Koperasi mengalami penurunan modal usahanya.

Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri dengan indikator “Rasio Kewirausahaan”, target tahun 2022 adalah 9,56 dengan realisasi 9,99 dengan kategori **Sangat Baik**. Upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam meningkatkan Rasio wirausaha sehingga usaha UMKM dapat berkembang dan berkelanjutan adalah :

1. Transformasi pertumbuhan wirausaha produktif dengan membina setiap orang yang memiliki jiwa dan menjalankan kewirausahaan untuk menciptakan ekosistem dan mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan dalam membentuk struktur usaha yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
2. Transformasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam menjalankan aktivitas usahanya dengan masuk ke dalam ekosistem digital seperti market place, e-commerce atau platform digital lainnya.
3. Transformasi usaha informal ke formal dengan memfasilitasi UMKM untuk memperoleh izin usaha yang lengkap, memiliki sertifikasi dan standardisasi usaha, dan dapat mengakses pembiayaan formal.

Tabel 2.12
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022		
			TAR GET	REALIS ASI	CAPAI AN (%)	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN (%)	TARG ET	REALIS ASI	CAPAI AN (%)
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25,25	25,64	101%
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	5,57	8,35	146%	6,27	9,17	146%	6,85	6,44	94%
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	N/A	N/A	N/A	8,38	9,55	113%	9,56	9,99	104%

Pada tabel di atas adalah perbandingan capaian pada 3 (tiga) tahun terakhir pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali pada tahun 2022. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori **Sangat Baik**. Data-data yang kosong merupakan bentuk penyesuaian indikator hasil review SAKIP, sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian indikator kinerja pertahunnya.

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional, fasilitasi akses pasar dan kemitraan dengan berbagai stakeholder yang relevan (off taker/buyer), dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi.
- b. Peningkatan Produktivitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi, Pembentukan Koperasi Produksi, Pendampingan dan Pemberdayaan Koperasi serta Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS) yang di gagas Gubernur Bali.
- c. Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga incubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM.

Tabel 2.13
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	TARGET AKHIR 2023	CAPAIAN	Tingkat Kemajuan
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,64	26,50	96,75	Akan Tercapai
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,44	7,50	85,87	Akan Tercapai
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	9,97	9,57	104,18	Sudah Melebihi Target Akhir RENSTRA

Dari tabel diatas dapat diketahui perbandingan capaian IKU tahun 2022 dengan Target Akhir RENSTRA Tahun 2023 :

Tabel 2.14
Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan dan peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25	25,64	101	Digitalisasi KUMKM dapat dicapai dikarenakan adanya, pendampingan tata kelola koperasi yang modern dan professional dan fasilitasi sarana promosi dan kemitraan bagi UKM melalui pameran dan digitalisasi	-
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85	6,44	94,01	Peningkatan Produktifitas Koperasi dapat dicapai dikarenakan adanya, Penguatan Literasi Keuangan melalui Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi dan Program Penguatan Kelembagaan (Koperasi) dan Permodalan Usaha dalam Kelompok Bersama Satupintu (KBS)	Untuk lebih meningkatkan produktifitas koperasi, perlu difokuskan untuk mensejahterakan anggota koperasinya, yang dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan anggota koperasi yang bergerak di sektor UMKM maupun

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Analisis Keberhasilan/ke gagalan	Solusi yang dilakukan
						yang di gagas Gubernur Bali	industri
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausaha an	9,56	9,98	104,29	Rasio Kewirausahaan meningkat dikarenakan adanya, pengembangan kewirausahaan melalui dunia pendidikan, peningkatan kapasitas lembaga incubator, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha dan startup, dan penyelenggaraan pendampingan dan konsultasi bisnis melalui PLUT KUMKM	-

Tabel 2.15
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISA SI	CAPAI AN (%)	ANGGARAN (Rp)	REALIS ASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Berkemba ngnya perekono mian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	25,25	25,64	101	23.344.418. 533	22.321. 546.376	95,62	4,38
2	Terwujudn ya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professio nal dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas koperasi	6,85	6,44	94,01	842.481.42 6	800.355 .764	95,00	5,00
3	Meningkat nya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausaha an	9,56	9,98	104,29	6.960.796.5 96	6.613.7 95.328	95,01	4,99

Tabel 2.16
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	Persentase KUMKM Menuju Digital	101				
a	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase peningkatan produktivitas Koperasi	94,01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	100	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	100	Menunjang
				Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	100	Menunjang
				Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	100	Menunjang
				Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	100	Menunjang

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiat an/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	100	Menunjang
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai ke sehatannya	100	Menunjang
				Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai ke sehatannya	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGA N KOPERASI	Persentase Koperasi/Kope rasi Tenun/Koperas i Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/S wasta	76,95	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanny a Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	100	Menunjang
				Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	100	Menunjang
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	100	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	100	Menunjang

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
b	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Kewirausahaan	104,29	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan</i>	100	Menunjang
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	100	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	100	Menunjang
				<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid</i>	100	Menunjang
				Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	100	Menunjang

Pencapaian Tujuan dan indikator tujuan tentunya juga didukung oleh 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian nasional. Agar berfungsi secara optimal sebagai pilar dan tulang punggung perekonomian, koperasi harus dikelola secara efisien dan produktif. Tingkat produktivitas koperasi, peningkatan efisiensi murni harus diprioritaskan,

diikuti dengan peningkatan efisiensi skala dan efisiensi teknis. Koperasi harus memberikan pelatihan reguler untuk staf mereka, manajemen profesional, mengadopsi teknologi canggih, dan memperbesar ukurannya dengan menggabungkan koperasi kecil menjadi entitas yang lebih besar.

Capaian sasaran strategis kesatu pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2022 target 6,85 dengan realisasinya adalah 6,44 dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2021 realisasinya terjadi sedikit penurunan sebesar 2,73 atau sama dengan 40%. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kesatu adalah :

1. Persentase Koperasi yang Bankable. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 83,33 dengan realisasi 100
2. Persentase koperasi/koperasi tenun/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 3,08 dengan realisasi 2,37.
3. Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 79 dengan realisasi 82.

b. Rasio Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat.

Capaian sasaran strategis kedua pada tabel 3.7 dapat ditunjukkan pada tahun 2022 target 9,56 dengan realisasinya adalah 9,97 dan termasuk pada kategori Baik, jika dibandingkan dengan tahun 2021. Indikator program (sesuai dengan RENSTRA 2018-2023) yang mendukung pada sasaran strategis kedua adalah :

1. Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 0,25 dengan realisasi 3,37
2. Persentase UMKM yang bankable. Target kinerja ini di tahun 2022 adalah 0,12 dengan realisasi 1,20.

b. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, DPPA Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp19.574.805.601,00 (Sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima ribu enam ratus satu rupiah) Realisasi Anggaran Rp17.602.062.572,00 (Tujuh belas milyar enam ratus dua juta enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,92%. Dalam melakukan analisis efisiensi anggaran untuk setiap sasaran, untuk bagian yang disajikan dalam tabel 2.15 ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk setiap sasaran. Sedangkan di tahun 2022 (tahun berjalan) target belanja/anggaran sebesar Rp22.441.608.190,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi anggaran sampai per Juni 2022 sebesar Rp9.683.869.770,00 (sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau sebesar 49,15 %.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat tinggi ataupun sangat tinggi, kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintah yang baik. Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	255.064.240,00	239.330.844,00	93,83
1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	17.956.000,00	16.111.052,00	89,72
a	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	17.956.000,00	16.111.052,00	89,72
2	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor KAS	237.108.240,00	223.219.792,00	94,14
a	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	237.108.240,00	223.219.792,00	94,14
B	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas	118.552.896	118.314.446	99,80

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya</i>	118.552.896	118.314.446	99,80
a	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya	118.552.896	118.314.446	99,80
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi/Koperasi Tenun/Koperasi Subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	468.864.290	442.710.474	94,42
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	468.864.290	442.710.474	94,42
a	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	315.246.554	292.723.244	92,86
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	153.617.736	149.987.230	97,64
D	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	5.823.253.216	5.500.456.370	94,46
1	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah pengelola Koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan</i>	5.823.253.216	5.500.456.370	94,46

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	5.823.253.216	5.500.456.370	94,46
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bankable	1.137.543.380	1.113.338.958	97,87
1	<i>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid</i>	1.137.543.380	1.113.338.958	97,87
a	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	1.137.543.380	1.113.338.958	97,87
F	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	15.058.868.555,00	14.463.273.014,00	96,04
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	80.630.016	80.033.676	99,26
a	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	78.417.006,00	78.049.876,00	99,53
b	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen capaian kinerja PD	2.213.010,00	1.983.800,00	89,64
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	12.586.926.541,00	12.215.344.802,00	97,05

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	12.586.926.541,00	12.215.344.802,00	97,05
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	96.895.770	85.069.060	87,79
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	9.999.250	9.585.873	95,87
b	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	64.931.520	56.770.136	87,43
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	14.965.000	12.311.051	82,27
d	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	7.000.000	6.402.000	91,46
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1.335.111.200,00	1.229.595.356,00	92,10
a	Penyediaan jasa surat-menyurat	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	2.000.000,00	2.000.000,00	100
b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	271.200.000,00	178.654.156,00	65,87
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1.061.911.200,00	1.048.941.200,00	98,78

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	959.305.028,00	853.230.120,00	88,94
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	729.460.536,00	633.589.352,00	86,86
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan mesin yang dipelihara	50.000.000,00	46.465.000,00	92,93
c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	179.844.492,00	173.175.768,00	96,29

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan ekspor
- b. Penguatan substitusi impor
- c. UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai pasok global (*Global Value Chain*)

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain:

1. Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM
2. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan pelaku mikro
3. Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM
4. Rendahnya daya saing, produktivitas dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM
5. Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini.

Adapun Isu-isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
- b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan
- c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha
- d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
 - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi

- Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan KUKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM.
 - Meningkatkan dalam memfasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN.
- 2) Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah adalah

Keberadaan dan peran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam menggerakkan sektor riil merupakan realitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Hal ini terbukti oleh penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan menengah dipandang menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan terhadap peningkatan kualitas koperasi, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah (UKM). Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor koperasi dan UKM menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi dan UMKM	Kurang optimalnya kelembagaan dan pengawasan bagi KUMKM	Aspek Kelembagaan : 1. Rendahnya aspek kelembagaan KUMKM 2. Rendahnya pengawasan akuntabilitas kinerja KUMKM 3. Rendahnya Akses Informasi perkoperasian dan UMKM 4. Belum adanya peta data dan perkembangan usaha koperasi yang komprehensif dan terkini 5. Belum optimalnya pendampingan kelembagaan koperasi dan UMKM
	Rendahnya kompetensi SDM pengelola Koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM	Aspek Sumber Daya Manusia 1. Rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM 2. Minimnya jumlah kaum muda di Bali tertarik dengan koperasi 3. Kurangnya Penguasaan Teknologi

	Terbatasnya akses pembiayaan bagi KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya informasi layanan perbankan /lembaga keuangan yang dimanfaatkan Koperasi dan KUMKM 2. Rendahnya kapabilitas KUMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan 3. Skema pembiayaan/pendanaan KUMKM masih terbatas pada sumber –sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan berbasis investasi
	Rendahnya Produktifitas, daya saing dan pemasaran produk KUMKM	<p>Aspek Produksi, Restrukturisasi Usaha dan Pemasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya Kapasitas dan kualitas produksi 2. Produk KUMKM belum memenuhi standarisasi 3. Belum optimalnya jaringan pemasaran dan kemitraan KUMKM 4. Belum optimalnya integrasi pemasaran hasil usaha mikro maupun home industri berbasis ekonomi digital dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2024 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :
- Sub kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha yang berdampak langsung kepada Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya yaitu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Kredit Bali Mandara serta memperluas pemasaran produk bagi UMKM.
 - Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mendorong pembentukan koperasi sektor riil.
 - Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan

Kemiskinan dengan sub kegiatan ini dapat mewujudkan tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor koperasi dan UMKM dan kemitraan UMKM.

- Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi berdampak terhadap pelaku KUMKM untuk mendapatkan sertifikasi teknis dan sertifikasi kompeten.
- 4) Tantangan dan peluang dalam Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh koperasi dalam era digital ini, sebagai berikut:
- Bali memiliki Sumber Daya Alam, Budaya dan Sumber Daya Manusia, yang sudah dikenal dan terkenal di dunia, menjadi potensi sangat besar dalam pengembangan produk IKM dan UMKM untuk produk ekspor.
 - Produk IKM dan UMKM, khususnya produk hasil olahan ,seni kerajinan dan tenun tradisional yang bernilai tinggi, banyak diminati oleh Warga Negara Asing (WNA).
 - Bali merupakan *top-of-mind* dari Indonesia, seperti “Paris” dari Perancis sehingga biaya pemasaran produk IKM dan UMKM Bali pada tingkat internasional akan relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lainnya.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai landasan hukum baru, juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih mantap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, peraturan pemerintah ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya selaras dengan usaha pemerintah untuk mewujudkan koperasi modern, UMKM naik kelas
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan

Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi diberikan Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yaitu untuk menambahkan layanan pendaftaran bagi pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa pemerintah (SPSE dan SiKAP) pada mal pelayanan publik daerah, termasuk layanan konsultasi pendaftaran sebagai merchant pada Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE); mendorong percepatan produk dalam negeri dan/atau produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada masing-masing daerah untuk tayang dalam Katalog Lokal atau Toko Daring, serta memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring.

- Pengembangan model tata kelola koperasi yang modern dan lebih inovatif dapat menjadi peluang dalam pengembangan koperasi kedepan, koperasi yang telah mengadopsi teknologi, berkapasitas produksi besar, memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan dan pasar untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan bermanfaat besar kepada anggotanya dengan tetap mengedepankan nilai dan prinsip koperasi.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
- Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
 - Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.
 - Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Selama proses tahapan-tahapan penyusunan dokumen perencanaan, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengalami perubahan baik dari sisi jumlah program dan kegiatan maupun dari besarnya penganggaran. Perbedaan nama dan jumlah program dan kegiatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2023,

ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukkan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2. 9

**Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Bali**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program/Kegiatan terkait Peningkatan Produktivitas SDM KUMKM, pemasaran, bahan baku	-	-	-	- Usulan yang disampaikan pada saat forum Perangkat Daerah sudah terakomodir pada beberapa Program yang ada pada Dinas, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
2	Program/Kegiatan IT dan Kompetensi bagi KUMKM	-	-	-	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berkolaborasi dalam dengan pihak terkait dalam hal ini Bank PenyalurKUR, Kemenkumham, Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi, Perangkat Daerah dan stakeholder untuk peningkatan Pelaku UMKM baik produk maupun kompetensi
3	Program/Kegiatan terkait HKI				
4	Program/Kegiatan Prnyaluran KUR				
5	Program/Kegiatan Penataan UMKM dalam KSPN Besakih				
6	Program/Kegiatan Pengembangan Inkubator Bisnis Provinsi Bali dengan Perguruan Tinggi				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Nasional periode 2020-2024 Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM RI periode 2020-2024 sebagai berikut:

Visi : “Terwujudkan Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Misi : Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing):

Tujuan :

- Modernisasi Koperasi
- Melahirkan entrepreneur baru
- Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain* (GVC)
- *Scaling Up* UMKM

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara prioritas pembangunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali menjawab dengan program yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- c. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- f. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- g. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kontribusi Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang Produktif, Mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung Perekonomian Nasional serta

tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali melalui Program – Program Prioritas Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan .

Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatnya kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam meningkatkan perekonomian Krama Bali dengan indikator Persentase KUMKM Menuju Digital.

Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya koperasi yang Berkualitas dan Modern
Indikator : Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
- b. Sasaran 2 : Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif
Indikator : Rasio Kewirausahaan.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah dimaksud sebagai perangkat daerah membantu Gubernur dalam melaksanakan program dibidang Koperasi dan UKM dengan program/kegiatan prioritas , melalui implementasi program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026 .

Adapun Program dan kegiatan dilaksanakan setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
e.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
C.	Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
2	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
D.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
b.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
E.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
F.	Program Pengembangan UMKM
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM
G.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas

	dan Kompetensi SDM Koperasi
	JUMLAH PROGRAM : 7
	JUMLAH KEGIATAN : 16
	JUMLAH SUB KEGIATAN : 28

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 berjumlah 7(tujuh) terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas dan 1 (satu) program pendukung , kegiatan berjumlah 16 (enam belas), dan sub kegiatan berjumlah 28 (dua puluh delapan).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Pembahasan

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2024 dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp. 21.274.817.856,00 (Dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). Adapun skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Skala Prioritas Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penentuan pagu anggaran
sebagaimana tabel berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	GAJI DAN TUNJANGAN(ASN)	GAJI DAN THR TENAGA KONTRAK	KESEKRETARIATAN (Fixed Cost)	KESEKRETARIATAN (Penunjang)	BELANJA PRIORITAS	TOTAL
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	14.168.705.429	2.592.046.824	2.189.583.603	2.202.949.000	560.000.000	21.274.817.856

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu yang telah ditetapkan sampai pada tahap penetapan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2024 dan ada beberapa kegiatan dan subkegiatan tidak mendapat alokasi pendanaan akan diadakan penyesuaian terhadap target yang pada saat penyusunan berdasarkan pagu indikatif tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta stakeholder (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.
- d. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024 antara lain :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp21.274.817.856,00 (Dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lampiran 1

Tabel 1.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
-	01	Koperasi dan UKM								
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi yang bankable	0,30	83,33	83,33	24,01	28,81	86,49	
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	15 unit usaha	71 Koperasi	71 KSP/USP	71 KSP/USP	100	12 unit usaha	
		Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh ijin usaha simpan pinjam	15 unit usaha	71 koperasi	71 KSP/USP	71 KSP/USP	100	12 unit usaha	
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu atau kantor kas	3 unit usaha	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	100	3 unit usaha	
		Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh ijin usaha	3 unit usaha	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi	100	3 unit usaha	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	pembukaan kantor cabang								
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat dan berkualitas	28,30 -					74,06-		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	100 unit usaha					- 35 unit usaha		
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah KSP/USP yang akuntabel	100 unit usaha					35 unit usaha		
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	80 unit usaha							
	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota masyarakat	Jumlah koperasi yang akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan pemberian manfaat kepada anggota KUKM dan masyarakat	80 unit usaha							
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat dan berkualitas		78,89	78,89	32,89	41,69			
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya		142 KSP/USP Koperasi	142 KSP/USP Koperasi	142 KSP/USP Koperasi	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Provinsi									
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi Nivo Provinsi yang dinilai kesehatannya		100 KSP/USP Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	100 KSP/USP Koperasi	100			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi/koperasi tenun/koperasi subak yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN. BUMD/Swasta	3,35	3,08	3,08	3,42	111,04			
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Nivo Koperasi yang didampingi	175 unit usaha	126 Koperasi	126 Koperasi	124 Koperasi	98,41			
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang difasilitasi temu mitra	85 unit usaha	60 Koperasi	60 Koperasi	60 Koperasi	100			
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi Nivo Provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat asset dan omsetnya	90 unit usaha	66 Koperasi	66 Koperasi	64 Koperasi	96,97			
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat			0,25	7,56	3.024			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengelola koperasi dan UMKM yang diberikan pelatihan			50 orang	1.519 Orang	3.038			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten			50 orang	1.519 orang	3.038			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang bankable	2,20	0,12	0,12	0,04				
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang memiliki ijin usaha dan terdata secara valid	615 UMKM	190 UMKM	190 UMKM	368 UMKM	193,68			
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah peningkatan kelas UMKM	615 UMKM	190 UMKM	190 UMKM	368 UMKM	193,68			

LAMPIRAN 2

TABEL 2.8

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	82,31	18.493.866.124,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	82,31	20.356.448.124,00	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	91.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	91.000.000,00	
a.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	85.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	85.000.000,00	
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.000.000,00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.000.000,00	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	14.168.705.429	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	14.168.705.429	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jjumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 orang	14.168.705.429,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jjumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 orang/bulan	14.168.705.429,00	
3.	-	-	-	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	20.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
a.	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	20.000.000,00	
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	2 dokumen	273.686.800,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	239.631.704,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	9.999.100,00	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.613.000,00	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	50.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	54.505.500,00	
c.	Sub Kegiatan enyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	95.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	80.000.000,00	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	12.187.700,00	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	16.729.100,00	
d.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	4.500.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	4.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
e.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua kota/kab, semua kecamatan, semua kel/desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat	2 laporan	102.000.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua kota/kab, semua kecamatan, semua kel/desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	73.284.104,00	
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	500.000.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 dokumen	408.806.887,00	
a.	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	500.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 unit	408.806.887,00	
6.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 dokumen	1.240.102.200,00	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	1.222.147.400,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.991.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	3.000.000,00	
b.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	271.200.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	280.000.000,00	
c.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	966.911.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum yang disediakan	1 laporan	939.147.400,00	
7.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen	2.220.371.695,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang	1 dokumen	2.803.474.756,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	<i>pemerintahan daerah</i>		<i>penunjang urusan pemerintahan daerah</i>			<i>pemerintahan daerah</i>		<i>urusan pemerintahan daerah</i>			
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		800.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 unit	825.761.272,00	
b.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		125.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	76 unit	50.000.000,00	
c.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1.295.371.695,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	1.927.713.484,00	
B.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	0,10 persen	252.000.000,00	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3 persen	237.829.480,00	
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	10 IUSP	182.000.000,00	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi		Jumlah izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	10 IUSP	217.829.480,00	
a.	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	10 unit usaha	182.000.000,00	<i>Sub Kegiatan Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</i>	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	10 Unit usaha	217.829.480,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
2.	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 izin cabang	70.000.000,00	Kegiatan Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang diterbitkan	1 unit usaha	20.000.000,00	
a.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		70.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 unit usaha	20.000.000,00	
C.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi sehat	23,58	149.952.896,00	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang berkualitas	7 persen	175.131.792,00	
1.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47 koperasi	74.976.448,00	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	47 unit usaha	50.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	47 koperasi	74.976.448,00	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Koperasi Yang dilakukan penguatan tata Kelola kelembagaan koperasi	47 unit usaha	50.000.000,00	
2.	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	45 koperasi	74.976.448,00	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	45 unit usaha	125.131.7922,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
a.	Sub Kegiatan Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	47 koperasi	74.976.448,00	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat kepada Anggota KUKM dan Masyarakat	45 unit usaha	125.131.7922,00	
D.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	0,25	4.063.640.212,00						
1.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	400 orang	2.069.296.554,00						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 orang	2.069.296.554,00						
2.	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan UKM	590 orang	1.994.343.658,00						
a.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM	590	1.994.343.658,00						
E.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,20	468.000.000,00	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3,20	225.131.792,00	
1.	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 koperasi	468.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	146 koperasi	225.131.792,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
a.	Sub Kegiatan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	70 unit usaha	293.000.000,00	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Koperasi dengan Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	70 unit usaha	50.000.000,00	
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 unit usaha	175.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 unit usaha	175.131.792,00	
F.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan kewirausahaan	0,50 persen	670.000.000,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		Persentase pertumbuhan kewirausahaan	6 persen	670.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	200 unit usaha	670.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah usaha kecil yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	200 unit usaha	475.658.960,00	
a.	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	520.000.000,00	Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 unit usaha	425.658.960,00	
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 orang	150.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Semua Kota/Kab, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 orang	50.000.000,00	
G.	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas	3,00	335.000.000,00	Program Pengembangan UMKM		Persentase UMKM Naik Kelas	3,00	212.697.688,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 unit usaha	335.000.000,00	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	125 unit usaha	212.697.688,00	
a.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	200.000.000,00	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	182.697.688,00	
b.	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	25 orang	135.000.000,00	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	25 orang	30.000.000,00	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	25 persen	135.131.792,00	
						Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	400 orang	135.131.792,00	
						Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 orang	135.131.792,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
						Koperasi					
	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH										
	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	82,31	944.599.020,00	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>		<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	82,31	859.470.176,00	
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	65.881.200,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	39.892.300,00	
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	666.400,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	666.400,00	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	4.237.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar (semua Kecamatan dan Kelurahan)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	2.725.900,00	
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	40.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	32.500.000,00	
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	1.000.000,00	
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	18.977.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	2.000.000,00	
2.	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	209.372.292,00	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	207.229.084,00	
a.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.001.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.000.000,00	
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	48.500.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporann	48.500.000,00	
c.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	159.871.292,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	157.729.084,00	
3.	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	230.880.384,00	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	612.348.792,00	
a.	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Kota Denpasar, semua	Jumlah kendaraan dinas operasional atau	1 unit	113.030.384,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	Kota Denpasar, semua kecamatan,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	95.900.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	kecamatan, semua kelurahan/Desa	lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	semua kelurahan/Desa	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	27.850.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	2.850.000,00	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		90.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Kota Denpasar, semua kecamatan, semua kelurahan/Desa	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	513.598.792,00	
					24.938.593.108,00					21.274.817.856,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	3 Dokumen	6.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	6.900.000,00
2	1	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					14.168.705.429,00				14.522.923.065,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	75 Orang/Bulan	1 Dokumen	14.168.705.429,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan	14.522.923.065,00
2	1	0	1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000,00				15.000.000,00	
2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	4 Orang	1 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	15.000.000,00
2	1	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah					239.631.704,00				314.739.820,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	10.613.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.498.965,00	
2	101.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	54.505.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.500.000,00	
2	101.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	109.250.000,00	
2	101.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	16.729.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.015.855,00	
2	101.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.175.000,00
2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	73.284.104,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	117.300.000,00
2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				408.806.887,00					400.000.000,00
2	1	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	20 Unit	1 Dokumen	408.806.887,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	400.000.000,00
2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.222.147.400,00					1.426.117.530,00
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.289.650,00
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	280.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	311.880.000,00
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	939.147.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.111.947.880,00
2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.803.474.756,00					1.927.515.627,00
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	21 Unit	2 Dokumen	825.761.272,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	920.000.000,00
2	101.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	76 Unit	2 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	143.750.000,00
2	101.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	4 Unit	2 Dokumen	1.927.713.484,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	863.765.627,00
2	1072	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							237.829.480,00					257.040.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2 7 0 2 1			1.0		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							217.829.480,00				182.000.000,00	
2 7 0 2 1			1.0	000 2	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
					Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Persen	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	217.829.480,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	10 Unit Usaha	182.000.000,00
2 7 0 2 2			1.0		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							20.000.000,00				75.040.000,00	
2 7 0 2 2			1.0	000 3	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi												
					Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Persen	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit Usaha	75.040.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
				Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan												
2	1	0		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						175.131.792,00				151.452.896,00		
2	1	0	1.0	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00				75.726.448,00		
2	1	0	1.0	000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi											
					Persentase koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.00 Persen	47 Unit Usaha	47 Unit Usaha	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha	75.726.448,00
2	1	0	1.0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						125.131.792,00				75.726.448,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2 1 0 1.0 000 2		Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
		Persentase koperasi berkualitas	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.00 Persen	45 Unit Usaha	45 Unit Usaha	125.131.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	45 Unit Usaha	75.726.448,00	
2 1 0 7 6		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						225.131.792,00						477.360.000,00	
2 1 0 7 6 1		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						225.131.792,00						477.360.000,00	
2 1 0 7 6 1 2		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.20 Persen	76 Unit Usaha	146 Unit Usaha	175.131.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	76 Unit Usaha	175.000.000,00
2	1	0	1.0	000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
		Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.20 Persen	70 Unit Usaha	146 Unit Usaha	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	70 Unit Usaha	302.360.000,00
2	1	0			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				475.658.960,00					683.400.000,00
2	1	0	1.0		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				475.658.960,00					683.400.000,00
2	1	0	1.0	000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Persentase pertumbuhan wirausaha	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Persen	225 Unit Usaha	200 Unit Usaha	425.658.960,00	DAK Non Fisik- PK2UKM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	225 Unit Usaha	533.400.000,00
2	1	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									
		Persentase pertumbuhan wirausaha	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.00 Persen	100 Orang	200 Unit Usaha	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	150.000.000,00
2	1	0	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				212.697.688,00					341.700.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2 7 0 8 1			1.0		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah							212.697.688,00				341.700.000,00
2 7 1 0 8 1			1.0	000 1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi											
		Persentase UMKM Naik Kelas	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Persen	100 Unit Usaha	125 Unit Usaha	182.697.688,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	100 Unit Usaha	205.000.000,00		
2 7 1 0 8 1			1.0	000 2	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM											
		Persentase UMKM Naik Kelas	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.00 Persen	225 Orang	125 Unit Usaha	30.000.000,00	DAK Non Fisik- PK2UKM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	225 Orang	136.700.000,00		
					UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							994.601.968,00			2.668.783.547,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							994.601.968,00			2.668.783.547,00	
2 7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							994.601.968,00			2.668.783.547,00	
2 7 1		0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							859.470.176,00			582.053.958,00	
2 7 1 6		0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							39.892.300,00			75.763.380,00	
2 7 1 6 1		0	1.0	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	666.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	766.360,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	2.725.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.873.470,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	32.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	46.000.000,00	
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Paket	2 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.150.000,00	
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.150.000,00
2	1701069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	2.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	21.823.550,00
2	17018	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							207.229.084,00					240.778.136,00
2	170181	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.151.150,00
2	170182	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	48.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55.775.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
				Pemerintahan Daerah												
2					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Laporan	2 Dokumen	157.729.084,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	183.851.986,00
2					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							612.348.792,00			265.512.442,00	
2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	1 Unit	2 Dokumen	95.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	129.984.942,00
2					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	5 Unit	2 Dokumen	2.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	32.027.500,00
2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.31 Nilai	3 Unit	2 Dokumen	513.598.792,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	103.500.000,00
2	1	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				135.131.792,00					2.086.729.589,00
2	1	0	1.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				135.131.792,00					2.086.729.589,00
2	1	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									
		Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.00 Persen	2033 Orang	400 Orang	135.131.792,00	DAK Non Fisik-PK2UKM, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2033 Orang	2.086.729.589,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
				ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian										
TOTAL									21.274.817.856,00					23.290.682.485,00